

ABSTRACT

ULAMA IN SOCIETY ACEHNESE

The Study of The Socio-Political Rules of Ulama In The Contemporary Acehnese Society

T.M. JAMIL

The research aimed at critically understand and tried to find the socio-political role concept of Acehnese *ulama* (Islamic teachers) in solving social problems. The study has also answered the question about who would be called *ulama* in the contemporary Acehnese society.

The research was conducted in Nanggroë Aceh Darussalam Province, that is, in the regencies of North Aceh, Pidie, West Aceh, South Aceh and East Aceh. Those regencies were chosen on the basis of consideration that the number of ulama who served the community was relatively many. In addition, a larger number of social problems frequently arose within those regions.

The sources of research were a number of community determined by purposive sampling technique. Observation, in-depth interview and library study were employed to collect information and data, while interpretative understanding was used to analyze the data of research results.

The result of showed that what so-called *ulama* by Acehnese people were those who had adequate religious knowledge and that the knowledge was used for the prosperity of people. However, when the knowledge they possessed had been used to

obtain power, the status and title of *ulama* as the symbol of respect and dignity were no longer respected by the community. Based on the collected information, it was discovered that Acehese people expected that *ulama* not only played their roles as actors, but also have to personate agent to solve social problems.

The result of the research also indicated that the characteristic of *ulama* for Acehese are high religious knowledge, *tawaduk* manner, *wara'*, *zuhud*, *istikamah*, and trustworthy. When someone possesses these characteristics, the community will regard and expecting that person much to be able to construct and form a good society.

The result of the research also indicated that the Acehese people gave good attention and appreciation to *ulama* in the resolution of social problems. The people judged and understood that Acehese *ulama* had tried seriously and persistently to overcome social problems from the pre-independence era up to the present time. However, there were still many problems left unresolved by *ulama* due to the fact that some certain groups of the community no longer trusted their socio-political roles. Acehese *ulama* frequently failed to solve social problems when they had to deal with the authority including their powerlessness in having dialogues to solve the problems of Aceh Liberation Movement (GAM). In this case, many of them had become the victims of the social conflict. The Acehese people now hope that *ulama* as the figures that they admire and respect will do things for the prosperity of people. Under the condition of relatively peaceful Aceh now, it is expected that *ulama* will become the symbol of peace that calms down the Acehese people who used to be socialis and psychologically pressured within the chains of violence in the past.

The existence of the Acehese ulama Assembly represent, the government's recognition to word the traditional institutional in Aceh. However, some people thought that the institutions were used by the government to master exploit ulama as the mediator between government and the society. For the Acehese ulama, the presence of the institution could be employed to consolidate their power for the benefit of the people.

Keyword: Islamic Teachers (*Ulama*), Society, The Role of Social, Contemporary



RINGKASAN

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara kritis dan berusaha menemukan konsep peran sosial politik ulama Aceh dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Studi ini juga telah menjawab pertanyaan siapa yang disebut ulama dalam konteks kekinian oleh masyarakat Aceh.

Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara, Pidie, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut relatif lebih banyak ulama yang mengabdikan dirinya pada masyarakat. Di samping itu, di wilayah tersebut juga relatif banyak masalah sosial yang acapkali muncul dalam masyarakat.

Yang menjadi subyek penelitian adalah warga masyarakat yang ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*. Untuk menjangkau informasi dan data digunakan teknik pengamatan, wawancara mendalam dan kajian kepustakaan. Selanjutnya, untuk menganalisis data hasil penelitian digunakan *interpretative understanding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama menurut masyarakat Aceh adalah orang yang mempunyai ilmu agama yang memadai dan ilmu yang mereka miliki digunakan untuk kemaslahatan umat. Namun, ketika ilmu yang dimiliki ulama telah digunakan untuk mendapatkan kekuasaan, maka status dan gelar ulama sebagai simbol kehormatan tidak lagi dihargai oleh masyarakat. Berdasarkan informasi yang dapat dikumpulkan, terungkap bahwa masyarakat Aceh mendambakan ulama Aceh

tidak hanya berperan sebagai aktor, tetapi juga harus berperan sebagai agen untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ciri-ciri ulama menurut masyarakat Aceh adalah warga masyarakat yang berilmu agama tinggi, bersikap tawaduk, wara', zuhud, istikamah, dan amanah. Ketika sifat-sifat ini dimiliki maka masyarakat sangat menghormati dan berharap banyak pada mereka agar mampu membina dan membangun masyarakat yang beradap.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memberikan perhatian dan apresiasi yang baik kepada ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Masyarakat menilai dan memahami ulama Aceh telah berusaha dengan tekun dan serius dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan sejak masa prakemerdekaan sampai sekarang. Meskipun demikian, masih banyak masalah sosial yang belum dapat diselesaikan dengan baik karena hilangnya kepercayaan dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat terhadap peran sosial politik ulama. Ulama Aceh seringkali gagal dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial ketika harus berhadapan dengan penguasa termasuk ketidakberdayaan mereka untuk berdialog dalam penyelesaian persoalan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bahkan dalam persoalan ini, ulama Aceh banyak yang menjadi korban konflik sosial tersebut. Masyarakat Aceh sekarang juga berharap banyak pada ulama sebagai tokoh yang mereka kagumi dan hormati. Dalam kondisi Aceh yang relatif damai saat ini, sudah sepatutnyalah ulama dapat menjadi "simbol kedamaian" untuk

dapat menyejukkan hati masyarakat yang di masa lalu secara sosial dan psikologis tertekan dalam belenggu kekerasan.

Kehadiran lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah kepada lembaga tradisional yang telah ada di Aceh. Meskipun munculnya lembaga tersebut juga dipahami oleh sebagian warga masyarakat Aceh sebagai upaya dari pemerintah untuk "menguasai" ulama dan memanfaatkan ulama untuk penyambung lidah dari pemerintah kepada warga masyarakat. Sementara bagi ulama Aceh dengan adanya lembaga ini dapat menghimpun kekuatan para ulama agar mereka mampu berbuat lebih baik untuk umat.